



GUBERNUR PAPUA

Jayapura, 25 Februari 2022

Nomor : 168.3/2393/SET
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Papua Tahun 2022.

Kepada
Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua

di -

JAYAPURA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Papua mengajukan Propemperda Provinsi Papua Tahun 2022, untuk dibahas dan disepakati bersama dan ditetapkan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2022 (daftar Propemperda terlampir).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

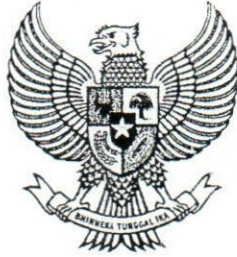


GUBERNUR PAPUA,

LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua Badan Program Pembentukan Peraturan Daerah DPRP di Jayapura.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

NOMOR : 03 /DPRP/2022

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPR Papua bersama dengan Eksekutif telah menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022;
 - b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dalam Rapat Paripurna DPR Papua;
 - c. bahwa untuk memenuhi huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat Jo. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan DPR Papua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2020 Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPR Papua tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-1 DPR Papua tanggal, 12 Juli 2022;

2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi dan Kelompok Khusus DPR Papua terhadap materi Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-2 DPR Papua tanggal, 12 Juli 2022;

Memperhatikan pula : Permusyawaratan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua pada Rapat Paripurna ke-2 DPR Papua tanggal 12 Juli 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2022;

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2022 Diktum KESATU berjumlah 30 (tiga puluh) Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua dan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana daftar terlampir;

KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA selanjutnya sebagai dasar kajian dalam pembahasan Raperdasi dan Raperdasus pada Tahun Anggaran 2022;

Lampiran : Keputusan DPR Papua
Nomor : .../DPRP/2022
Tanggal : 12 Juli 2022
Tentang : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua
Terhadap Program Pembentukan Peraturan
Daerah Tahun 2022.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
PROVINSI PAPUA TAHUN 2022

NO.	JUDUL RANPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
A. DIAJUKAN OLEH EKSEKUTIF								
1.	RAPERDASUS TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA	- KEANGGOTAAN MRP - PERSYARATAN CALON - HAK MEMILIH DAN DIPILIH - WILAYAH PEMILIHAN DAN KUOTA - PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	✓		Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua	BADAN KESBANGPOL	2022	
2.	RAPERDASI TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH IRIAN BHAKTI MENJADI PERSEROAN DAERAH IRIAN BHAKTI PAPUA	- MAKSUD DAN TUJUAN - PERUBAHAN BENTUK - NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN - BIDANG USAHA - MODAL - SAHAM-SAHAM - RUPS	✓		Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan usaha Milik Daerah	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	2022	
3.	RAPERDASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH	- OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI - RETRIBUSI JASA UMUM - RETRIBUSI JASA USAHA - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU - WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN - PENDAFTARAN DAN PENDATAAN		✓	Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2022	
4.	RAPERDASI TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	- LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - HIBAH - DANA DARURAT	✓		Pasal 286 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2022	
5.	RAPERDASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDASI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	- PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH - PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN - PENERIMAAN DAN PENYALURAN - PENGGUNAAN - PENATAUSAHAAN DAN PEMANFAATAN - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN	✓		1. Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 2. Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2022	

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
12.	RAPERDASUS TENTANG TATA KELOLA KEUANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWENANGAN KHUSUS		✓			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2022	
13.	RAPERDASI TENTANG PERANGKAT DAERAH		✓			BIRO TATA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS	2022	
B. INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA								
1.	RAPERDASI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI PAPUA TAHUN 2022-2024	- KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH - INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI - KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI DAN RPIP PAPUA 2022-2045 - KAIDAH PELAKSANAAN - SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN - PEMBIAYAAN	✓			DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	2022	
2.	RAPERDASI PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH	- KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA DAN SASTRA DAERAH - PENGGUNAAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH - PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PERLINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH - ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN - PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN - PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH - PERAN SERTA MASYARAKAT	✓		KEBUTUHAN HUKUM DAN ASPIRASI RAKYAT	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2022	
3.	RAPERDASI PEDOMAN PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL TANPA PAKSAAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROVINSI PAPUA	- PELAKSANAAN PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI DI AWAL TANPA PAKSAAN - HAK DAN KEWAJIBAN - PEMBIAYAAN					2022	
4.	RAPERDASI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN	- TATA CARA PENYUSUNAN APBD - TATA CARA PELAKSANAAN APBD - PERUBAHAN DAN PERHITUNGAN APBD			Pasal 36 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2021	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2022	

NO.	JUDUL RANPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTANSI TERKAIT		TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH					
	PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI, PERUBAHAN DAN PERHITUNGANNYA, SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN	- PERTANGGUNGJAWABAN APBD - PENGAWASAN APBD		✓					
5.	RAPERDASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KEPEGAWAIAN DAERAH	- PERENCANAAN KEBUTUHAN - PENERIMAAN - PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN		✓	Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 106 Tahun 2021	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		2022	
6.	RAPERDASI PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	- PESERTA DIDIK - PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL - PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL - PENDIDIKAN INFORMAL - WAJIB BELAJAR - PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS - PENDIDIKAN BERBASIS MUATAN LOKAL - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN - EVALUASI - PENGAWASAN - PENDANAAN	✓			DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		2022	
7.	RAPERDASI KEPOLISIAN DAERAH	- PENGANGKATAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH DAN WAKIL KEPALA KEPOLISIAN DAERAH - PENERIMAAN BINTARA POLISI - KURIKULUM PENDIDIKAN BINTARA POLISI - SELEKSI PERWIRA PERTAMA - SELEKSI PERWIRA MENENGAH DAN TINGGI - PENEMPATAN PADA JABATAN KEPOLISIAN - PERADILAN ADAT - PENJAGA WILAYAH ADAT - KAMTIBMAS - HUBUNGAN FUNGSIONAL - PEMBIAYAAN	✓		KEBUTUHAN HUKUM DAN ASPIRASI RAKYAT			2022	

NO.	JUDUL RANPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
8.	RAPERDASI PEMBERIAN LAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA OLEH TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT	- ASAS DAN TUJUAN - TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT - JENIS DAN TATA CARA PEMBERIAN LAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - TEMPAT LAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PARALEGAL - MONITORING DAN EVALUASI - PEMBIAYAAN	✓			BIRO HUKUM	2022	
9.	RAPERDASI PENGUATAN LEMBAGA PELOPOR PENDIDIKAN	- TUJUAN - PENGUATAN - PENGATURAN PENGUATAN - TATA CARA DAN PENETAPAN PEMBERIAN PENGUATAN	✓		KEBUTUHAN HUKUM DAN ASPIRASI RAKYAT	DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2022	
10.	RAPERDASI PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN SAGU	- PERLINDUNGAN SAGU - PENGEMBANGAN SAGU - KEWAJIBAN - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN - LARANGAN - PENYIDIKAN - KETENTUAN PIDANA	✓		KEBUTUHAN HUKUM DAN ASPIRASI RAKYAT	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	2022	
11.	RAPERDASI PERUBAHAN PERDASI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG KEPENDUDUKAN	- WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH - HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK - PENGENDALIAN PENDUDUK - PENERTIBAN PENDUDUK - PERTUMBUHAN PENDUDUK ORANG ASLI PAPUA - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - TRANSMIGRASI - LARANGAN	✓			DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2022	
12.	RAPERDASUS PERUBAHAN ATAS PERDASUS NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN KEBUDAYAAN ASLI PAPUA DI PROVINSI PAPUA	- PERLINDUNGAN KEBUDAYAAN ASLI PAPUA - PEMBINAAN KEBUDAYAAN ASLI PAPUA - PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN ASLI PAPUA - NAMA DAN GELAR ADAT	✓			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2022	

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
13.	RAPERDASI PERUBAHAN ATAS PERDASUS NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN GUBERNUR TERHADAP PERJANJIAN						2022	
14.	RAPERDASUS PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS RAKYAT PAPUA	- KETENTUAN UMUM - PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG - KETENTUAN PERALIHAN					2022	
15.	RAPERDASUS PENGELOLAAN DANA ABADI DAERAH	- KETENTUAN UMUM - TUJUAN - PEMBENTUKAN DANA ABADI DAERAH - PENGELOLAAN DANA ABADI DAERAH - PENERIMA MANFAAT - AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN - PENDANAAN - KETENTUAN PENUTUP					2022	
16.	RAPERDASUS PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN EKONOMI ORANG ASLI PAPUA	- TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH - HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA - KEMITRAAN - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN - PEMBIAYAAN			Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2021	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN	2022	
17.	RAPERDASUS TENTANG PENGAWASAN SOSIAL DI PROVINSI PAPUA	- KETENTUAN UMUM - MAKSUD DAN TUJUAN - HAK DAN KEWAJIBAN - BENTUK PENGAWASAN SOSIAL - PENGAWASAN SOSIAL - DENGAR PENDAPAT UMUM - HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN - PENGHARGAAN - SANKSI - KETENTUAN PIDANA - KETENTUAN PENUTUP					2022	

Jayapura, 12 Juli 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
Ketua,


JHONY BANUA ROUW, SE.